

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermawan, A. (2009). *Penelitian Bisnis*. Grasindo.
- J Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Jogiyanto, H. M. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Nomor 65 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2004 (2018).
- Lestyowati, J. (2019). Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas. *JPM, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 177–186.
- Mirawati, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Pradana, H. Y. (2018). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Universitas Sanata Dharma.
- Shuida, I. N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. In *Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Menko BPMK RI, Jakarta*.
- Sudaryono, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. UNY Press Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta (ed.)).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, H. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Keduabelas. Erlangga. Jilid.
- Wiratna, V. S. (2015). *Sistem Akuntansi*. In *Pustaka Baru Press: Yogyakarta*.
- Yuliansyah, Y., & Munandar, M. (2017). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(2), 181.